



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.40 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. H. Sigit Sosiantomo
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala Balitbang, Kepala BPSDM, Kepala BPIW dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Setjen, Irjen, Balitbang, BPSDM, BPIW V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019.
 - 2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan Setjen, Irjen, Balitbang, BPSDM, BPIW dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM dan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM dan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM dan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Kerja/ Program	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF	PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2020
1.	Sekretariat Jenderal	587.253.043	510.055.728	520.055.728
	(Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR)	314.453.403	274.307.694	284.307.694
	(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR)	272.800.000	235.748.034	235.748.034
2.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR)	113.454.179	96.744.238	96.744.238
3.	Badan Penelitian Dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR)	624.575.368	463.571.414	463.571.414
4.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah)	252.142.139	219.395.709	199.395.709
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)	528.595.431	395.188.892	425.188.892

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM dan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan pagu anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

3. Sebagai tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat tanggal 17 Juni 2019, Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM dan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.

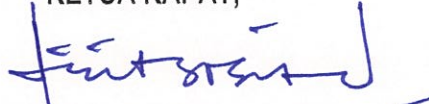
4. Komisi V DPR RI telah memperoleh penjelasan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan akan mendalami lebih lanjut terkait ruang lingkup serta tugas pokok dan fungsinya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2019

KETUA RAPAT,



SIGIT SOSIANTOMO

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR,



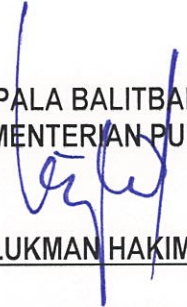
ANITA FIRMANTI

KEPALA BPIW
KEMENTERIAN PUPR,



HADI SUCAHYONO

KEPALA BALITBANG
KEMENTERIAN PUPR,



LUKMAN HAKIM

KEPALA BPSDM
KEMENTERIAN PUPR,



LOLLY MARTINA MARTIEF

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR,



WIDIARTO

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PUPR,



EKO. D HERIPOERWANTO